

# **DIMENSI PENAWARAN, PERMINTAAN, SERTA PENETRASI KREDIT USAHA RAKYAT KUR DAN USAHA MIKRO UMi REGIONAL MALUKU SERTA PENGARUH PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SEKTOR EKONOMI**

**Iwan Teguh Setiawan  
Thedy Dwi Prasetyo  
Aginta Genius  
Immanuel Budi Utomo  
Azizah Nur Ramadhani**

## **Abstract**

*Financial inclusion provides financial access in the form of convenience, security and convenience of transactions to meet capital needs to low-income groups or whose do not have access to banking services. Two forms of financial inclusion services provided by the Government are Kredit Usaha Rakyat (KUR) and Ultra Micro (UMi) financing. This study uses a statistical approach and a public sentiment approach, with the results that HDI (Expenditures) has a positive and significant correlation with the Per-capita GRDP of the Maluku region as well as the distribution of the government's KUR and UMi. In addition, there are several factors that correlate with KUR values, namely the number of cooperatives. The government can strengthen service schemes and mechanisms with various policy variations in the community's approach to government-owned KUR so that the government's goals for KUR are the economy and the business capacity of the community as well as increasing the potential for expansion of KUR can be carried out according to economic growth targets.*

**Keywords:** *Financial inclusion, Micro Small Business, Financing, Human Development Index, People's business credit and Gross Domestic Product*

## **Abstrak**

Inklusi keuangan menyediakan akses finansial dalam bentuk kemudahan, keamanan dan kenyamanan transaksi atas pemenuhan kebutuhan modal kepada para kepada kelompok masyarakat dengan pendapatan bawah atau tidak memiliki akses layanan Perbankan. Dua bentuk layanan inklusi keuangan yang disediakan oleh Pemerintah yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan statistika serta pendekatan sentiment masyarakat yakni dengan hasil IPM (Pengeluaran) memiliki korelasi positif dan signifikan dengan PDRB Per-Kapita wilayah Maluku serta penyaluran KUR dan UMi milik Pemerintah. Disamping itu terdapat faktor yang berkorelasi atas nilai penyaluran

KUR yakni jumlah Koperasi. Pemerintah dapat memperkuat skema dan mekanisme penyaluran dengan berbagai variasi kebijakan terutama dalam pendekatan masyarakat terhadap KUR milik pemerintah sehingga tujuan pemerintah atas KUR yakni *me-leverage* ekonomi dan kemampuan usaha masyarakat serta peningkatan potensi perluasan KUR dapat terlaksana sesuai target pertumbuhan ekonomi.

**Kata kunci:** Inklusi keuangan, Kredit Usaha Rakyat, Usaha Mikro Kecil, Pembiayaan, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia

## PENDAHULUAN

Kemajuan atau perkembangan suatu wilayah perlu diukur untuk melihat kesinambungan di masa depan terutama dalam melihat hubungan antar faktor pendukung khusus yang membentuk kemajuan tersebut. Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator atas kemajuan suatu wilayah yang terukur dari tingkat Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi pengeluaran tentunya dengan nilai nominal positif dan meningkat di setiap periode pengukuran. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku tahun 2021 mencapai 69,71, meningkat 0,22 poin (0,32 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Selama 2010-2021, IPM Maluku rata-rata meningkat sebesar 0,74 persen. Peningkatan IPM Maluku 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal tersebut berbeda dengan peningkatan IPM Maluku di tahun 2020 dimana hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur

panjang dan hidup sehat serta dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak terjadi penurunan. Pada 2021, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat sebesar 0,44 persen.

Salah satu indikator keberhasilan suatu negara menurut Todaro dan Smith (2011) adalah laju pertumbuhan ekonomi yang dapat mencerminkan kemampuan pertambahan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Terdapat tiga komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan jumlah penduduk, dan kemajuan teknologi. Jika dilihat dari sisi indikator tersebut dapat disiratkan bahwa akumulasi modal sebagai faktor usaha berpengaruh cukup besar disamping dengan adopsi teknologi dan perbandingan lurus dengan pertumbuhan penduduk. Pemerintah sebagai agen yang bertanggungjawab di dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari peningkatan IPM memiliki program

pembiayaan berbentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Usaha Mikro (UMi) yang disalurkan kepada debitur di seluruh Indonesia dengan mekanisme *channeling* usaha mikro, kecil maupun menengah (UMKM). Tujuan dari program pembiayaan tersebut secara khusus adalah meningkatkan (*leverage*) tingkat modal masyarakat level piramida bawah atau yang tidak dapat tersentuh oleh sistem perbankan sehingga kelompok masyarakat tersebut dapat tumbuh (usaha) mandiri secara ekonomi. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan pertama kali pada tanggal 5 November 2007 melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi untuk menjamin percepatan pelaksanaan serta penyaluran kredit. Penyaluran KUR di wilayah Maluku dilakukan melalui beberapa Bank Umum yakni Bank Rakyat Indonesia, BNI, BTN, Mandiri, BPD Maluku Malut, sedangkan mekanisme penyaluran UMi melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian. Pembiayaan KUR tidak hanya dilakukan menggunakan dana pemerintah saja tetapi masing-

masing pihak perbankan tersebut juga memiliki program UMKM tersendiri seperti KUR menengah perbankan, KUR Mikro Perbankan, KUR Kecil Perbankan sehingga KUR dengan dana pemerintah ikut bersaing porsi di dalam penyaluran UMKM wilayah Maluku. Menurut Muchlis (2017) atas kondisi bertahannya usaha mikro, kecil maupun menengah (UMKM) dalam menghadapi krisis dan kondisi ekonomi yang tidak stabil telah menunjukkan betapa pentingnya UMKM terhadap perekonomian nasional. Peran penting usaha kecil menengah khususnya pada *emerging market* selalu dikaitkan pada masalah ekonomi dan sosial yakni kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, serta ketimpangan lainnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, keberadaan UKM diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas. Kondisi tersebut dapat direfleksikan dengan adanya terpaan badai pandemic COVID-19 yang terjadi mulai tahun 2020 yang meruntuhkan perekonomian dunia sampai regional namun keberadaan UMKM

diestimasikan cukup kuat dalam menopang ekonomi sektor riil sehingga dampak pelemahan ekonomi tidak dirasakan cukup dalam jika dibandingkan dengan krisis ekonomi tahun 1998. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi asumsi yakni apakah pembiayaan KUR dan UMi milik pemerintah memberikan kontribusi di dalam peningkatan IPM khususnya wilayah Maluku serta bagaimana pengaruhnya terhadap porsi pembiayaan milik perbankan. Selain itu, faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan jumlah penyaluran baik dari sisi jumlah nominal maupun jumlah Debitur atas pembiayaan KUR dan UMi milik pemerintah. Hal lainnya yang akan ditinjau adalah terkait *awareness* masyarakat akan keberadaan pembiayaan KUR dan UMi terutama dilakukan melalui fasilitas *online* (jaringan internet).

## **TINJAUAN LITERATUR**

Menurut Sari dan Telisa Aulia Falianty (2021), inklusi keuangan dan struktur keuangan tidak berdampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Akan tetapi, untuk provinsi dengan nilai HDI kategori tinggi, inklusi keuangan dan struktur keuangan berdampak signifikan negatif terhadap ketimpangan pendapatan sehingga Kebijakan mengenai inklusi keuangan untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan perlu memperhatikan karakteristik setiap wilayah, khususnya kualitas sumber daya manusia.

Menurut Jauch, S., & Watzka, S. (2016), pengembangan keuangan inklusi memiliki efek positif terhadap kesenjangan pendapatan dengan peningkatan sebuah persetujuan kredit sebesar 10% berpengaruh pada peningkatan koefisien GINI sebesar 0,23 poin.

Menurut Fouejieu, A., Sahay, R., Cihak, M., & Chen, S. (2020) terkait inklusi keuangan dan kesenjangan kesejahteraan dalam bentuk Analisa antar negara menyatakan adanya korelasi negatif antara inklusi keuangan dan ketimpangan pendapatan. Selain itu, dampak inklusi keuangan pada ketimpangan tampaknya lebih kuat di negara berkembang. Tingkat inflasi tidak ditemukan memiliki efek yang jelas pada tingkat ketimpangan.

Namun, keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan penduduk berkorelasi positif dengan ketimpangan pendapatan.

Raji, R.O. (2021) menyatakan bahwa otoritas ekonomi dalam rangka mencapai dan mempertahankan pertumbuhan yang adil, dibutuhkan kebijakan disiplin sepenuhnya yang dapat mempromosikan dan meningkatkan inklusi keuangan serta pertumbuhan inklusif dari sebagian besar populasi tidak boleh dikelola dan ditangani dengan tangan kosong. Otoritas harus menetapkan kebijakan peningkatan pembangunan manusia melalui kesehatan, pendidikan, perbaikan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan serta akses ke layanan keuangan untuk memacu pembangunan inklusif daripada pertumbuhan ekonomi. Hal terpenting, pihak berwenang harus memperkuat supremasi hukum dan penegakan yang ketat dari serangkaian peraturan minimum yang diperlukan.

Ummah, B., Nuryantono, N., & Anggraeni, L. (2015) menyatakan bahwa rata-rata tingkat inklusi keuangan seluruh provinsi di Indonesia bernilai

rendah yakni berkisar antara 0,1-0,33, kecuali khusus Provinsi Jakarta yang bernilai tinggi mencapai 0,8.

Hasil analisa dari Beck et al. (2007) atas penelitian keterkaitan antara distribusi pendapatan dengan pendapatan masyarakat kelas bawah serta pembangunan sektor keuangan dengan sampel data 72 negara dalam periode 45 tahun melalui metode GMM yakni peningkatan infrastruktur keuangan memiliki efek positif dalam mendorong ekonomi masyarakat kelas bawah atau miskin.

Menurut Adam, L., di dalam artikel pelibatan koperasi dalam program KUR: sebuah inovasi kebijakan ekonomi dengan peluang dan tantangannya menyatakan bahwa pelibatan koperasi sebagai wadah penyaluran KUR membuka potensi dan peluang sekaligus tantangan dalam proses perbaikan kinerja dan tata pelaksanaan KUR sebagai bentuk Lembaga ekonomi yang sangat dekat serta sangat memahami atas permasalahan dan kebutuhan UMKM.

## METODOLOGI PENELITIAN

Data panel atau dapat disebut cross-sectional time-series data digunakan di dalam penelitian ini dengan tujuan untuk melihat korelasi indikator secara horizontal (periode/waktu) serta vertikal (level regional kabupaten kota) serta karakteristik penyusun komponen indikator. Disamping itu, dapat dimungkinkan untuk dilakukan kontrol untuk variabel-variabel yang tidak dapat diukur atau diobservasi secara mudah. Namun demikian, terdapat tantangan di dalam proses pembentukan data panel berupa kecukupan desain dan data sampling, respons minimal untuk skala mikro panel.

Sebagai bagian dari tujuan pembentukan penelitian, data panel penelitian ini dibentuk dari data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemerintah Daerah, dan sumber lainnya. Beberapa data yang digunakan diantaranya: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per-Kapita, tingkat inflasi, tingkat ketimpangan kemiskinan (GINI Rasio), tingkat kemiskinan, Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Usaha Mikro (UMi). Batasan penggunaan data adalah range periode data antara Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 dengan penggunaan detail per-Kabupaten atau Kota wilayah Maluku (11 kabupaten/kota). Pada tahap awal penelitian ini menggunakan 20 variabel yang digunakan untuk pencarian model yang robust serta dapat memenuhi *Best Linear Unbiased Prediction* (BLUP) dan *Best Linear Unbiased Estimation* (BLUE).

Tabel 1. Variabel Penelitian yang Digunakan Tahap Awal

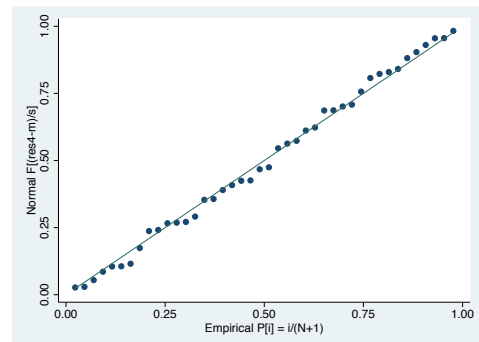
DATA	DEFINISI	SUMBER
Wilayah (Kode Wilayah)	Wilayah Maluku terdiri dari 11 Kabupaten/Kota	Kementerian Keuangan
DEBITUR KUR Umi	Jumlah debitor KUR dan UMi pendanaan Pemerintah RI	Kementerian Keuangan
NOMINAL PENYALURAN KUR Umi	Nilai penyaluran KUR dan UMi wilayah Maluku	Kementerian Keuangan
IPM Pengeluaran	Indeks Pembangunan Manusia dengan penggunaan pada sektor pengeluaran	BPS
Jumlah Bank Umum	Jumlah Bank Umum yang terdapat di Maluku	BPS
Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	Jumlah BPR yang ada di Maluku	BPS
Jumlah Lembaga Pembiayaan	Jumlah Lembaga Pembiayaan yang terdapat di Maluku	BPS
KUR khusus Bank Umum	Nilai KUR khusus milik Bank Umum yang disalurkan oleh Bank-Bank Umum	BPS
KUR Mikro Bank Umum	Nilai KUR Mikro milik Bank Umum yang disalurkan oleh Bank-Bank Umum	BPS
KUR Kecil Bank Umum	Nilai KUR Kecil milik Bank Umum yang disalurkan oleh Bank-Bank Umum	BPS
KUR Menengah Bank Umum	Nilai KUR Menengah milik Bank Umum yang disalurkan oleh Bank-Bank Umum	BPS
Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi yang ada di Maluku	BPS
PDRB PER-KAPITA	Nilai PDRB Per-Kapita per Kabupaten/Kota wilayah Maluku	BPS
Tingkat Kemiskinan (Persentase)	Tingkat kemiskinan wilayah maluku berdasarkan persentase	BPS
Jumlah Usaha Mikro Kecil	Jumlah usaha level mikro dan kecil wilayah Maluku	BPS
Jumlah Tenaga Kerja Mikro Kecil	Jumlah Tenaga Kerja pada usaha level mikro dan kecil wilayah Maluku	BPS
Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi yang terdapat di Maluku	BPS
Jumlah Industri Kerajinan Formal	Jumlah Industri Kerajinan Formal yang terdapat di Maluku	BPS
Jumlah Industri Kerajinan Non Formal	Jumlah Industri Kerajinan Non Formal yang terdapat di Maluku	BPS
Inflasi Regional	Tingkat Inflasi wilayah Maluku yang dengan proxy tingkat inflasi Kota Ambon dan Kota Tual	BPS
Gini Rasio	Rasio GINI atas ketimpangan pendapatan yang digunakan annual setiap september	BPS

Dalam pengembangan penelitian dilakukan beberapa tahap yakni dimulai

dari penggunaan *framework* teoritis untuk mendefinisikan pengukuran atas indikator komposit dan kemudian dilanjutkan pada tahap pemilihan variabel. Variabel dipilih (tabel variabel penelitian atas) harus merefleksikan tujuan atau pemenuhan hipotesis penelitian. Sebelumnya variabel yang digunakan harus dipastikan cenderung pada distribusi normal sesuai fungsi densitas:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

, dengan kondisi rata-rata (*mean*) sama dengan '0' dan simpangan baku sama dengan '1' dan selanjutnya dilakukan proses pengujian sesuai dengan metode modeling yang digunakan dalam penelitian yakni Uji Chow memiliki hipotesis:  $H_0 : \alpha_{0i} = \alpha_0$  (CEM) dan  $H_1 : \text{minimal ada satu intersep } \alpha_{0i} \neq \alpha_0$  (FEM);  $i = 1, 2, \dots, 11$  serta uji Hausman untuk menentukan model yang lebih baik di antara FEM dan REM. Pengujian Hausman dilakukan dengan hipotesis  $H_0 : \text{corr}(X_{it}, \varepsilon_{it}) = 0$  (model REM)  $H_1 : \text{corr}(X_{it}, \varepsilon_{it}) \neq 0$  (model FEM).



Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
res4	42	0.98734	0.519	-1.382	0.91656

Gambar 1. Normalitas Data antar Variabel sebelum dilakukan proses Pemilihan *Best Fitted Model* dan Model Uji Asumsi

Kondisi data pada variabel penelitian ini terdistribusi normal dengan Prob>Z di atas *Confidence Interval* 95%.

Metode penelitian yang digunakan adalah *fixed effect* dan *random effect* dengan persamaan model awal *fixed effect* maupun *random effect*.

$$Y_{it} = \beta_1 X_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

Pengembangan model persamaan:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1,it} + \dots + \beta_k X_{k,it} + \gamma_2 E_2 + \dots + \gamma_n E_n + u_{it}$$

dimana  $i = 1, 2, \dots, 11$ ;  $t = 2015, \dots, 2021$ .

Berdasarkan atas persamaan struktural tersebut, maka akan dapat dipecahkan sebanyak N-variabel endogen dan diperoleh persamaan dalam bentuk tereduksi. Persamaan dengan bentuk tereduksi adalah suatu persamaan yang

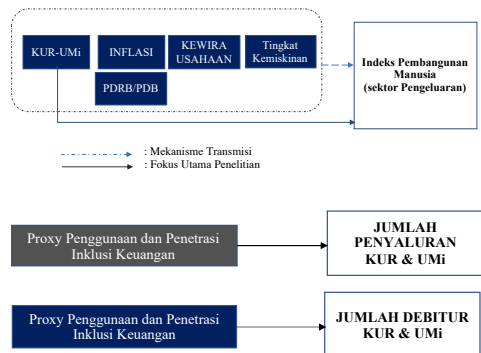


dapat menjelaskan variabel endogen hanya berdasarkan variabel eksogen dan residual stokastik.

penetrasi atas tingkat permintaan;

## Model Dalam Penelitian:

### Lingkup dalam regional Maluku



Gambar 2. Model Penelitian

Kondisi penelitian ini juga dilakukan untuk melihat permintaan dan penawaran serta kondisi penetrasi pasar inklusi keuangan dimana menurut Sarma (2012), terdapat tiga vektor dimensi dalam Indeks Inklusi Keuangan, yakni dimensi (1) ketersediaan atau penawaran atas layanan dengan indikator diantaranya ketersediaan jumlah Bank atau lembaga penyalur (Bank Umum/Lembaga Penyalur Keuangan/Bank Perkreditan), ketersediaan outlet transaksi keuangan (ATM, layanan kliring dan transfer) yang tersedia per-1000 populasi, dimensi (2) kebutuhan atas penggunaan dana sektor inklusi,yakni pada kelompok

Tabel 2. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
YEAR	77	2018	2.013115	2015	2021
KDWIL	77	6	3.183014	1	11
WIL	0				
DEBKURUMI	77	2124.948	2397.362	0	16958
SALKURUMI	77	5.33e+10	5.79e+10	0	2.74e+11
IPMEC	77	8510.351	2134.702	5697	14233
JBANKUM	77	10.75325	8.217689	3	34
JBPR	77	1.532468	.7789259	0	3
JLPemb	77	2.662338	6.118588	0	28
KURBANKUM	77	50088.77	70796.73	8	358348
MIKROBANKUM	77	99298.1	105484.6	1696	501963
KECILBANKUM	77	140427.5	218606.4	0	1125117
NENGABANKUM	77	78726.86	175601.6	0	694462
JKOP	77	300.7792	185.6595	136	782
PDRBKap	77	15.55474	4.52572	9.171378	30.46
PersenMiskin	77	21.91792	6.868414	4.38	31.58
JUSMici1	77	1172.844	732.5623	406	4493
JTKMici1	77	3679.623	2557.747	755	11289
JIndKrajInF	77	24.23377	12.82667	1	55
JIndKrajInNF	77	53.67532	23.20245	1	123
INReg	77	1.073766	.7854416	.07	2.37
GINIR	77	.3272857	.0094533	.316	.344
JTKProdIah	77	5119.299	4682.499	47	19678
JTKProdrt1	77	11228.43	15273.43	841	66242
JWIRAUsh	77	16847.83	15228.89	3727	55500
lnIPMEC	77	9.021799	.2281063	8.647695	9.563318
logIPMEC	77	9.021799	.2281063	8.647695	9.563318
lnSALKURUMI	75	23.95789	1.51536	18.85894	26.33617
lnINReg	77	-.3629856	1.072046	-2.65926	.8628899
sqINReg	77	1.761881	1.059161	.0049	5.6169
lnPDRBKap	77	2.704867	.2808009	2.216088	3.416414
INReg_Lag1	76	1.068947	.7895139	.07	2.37
INReg_Lag2	75	1.081067	.7876814	.07	2.37
lnINReg_L-1	76	-.3725596	1.07585	-2.65926	.8628899
lnKURBANKUM	77	9.455164	2.236804	2.079442	12.78926
SALKURUMI_~1	76	5.37e+10	5.82e+10	0	2.74e+11
lnSALKURUM_~1	74	23.96279	1.525106	18.85894	26.33617
KURBANKUM_~1	76	50087.01	71070.95	8	358348
lnKURBANKUM_~1	76	9.46054	2.248565	2.079442	12.78926
SALKURUMI_~2	75	5.43e+10	5.84e+10	0	2.74e+11
lnSALKURUM_~2	73	23.97266	1.533282	18.85894	26.33617
lnJBANKUM	77	2.160957	.6291629	1.098612	3.526361
lnJBPR	74	3732656	.4266812	0	1.098612
lnJKOP	77	5.555802	.5242682	4.912655	6.661855

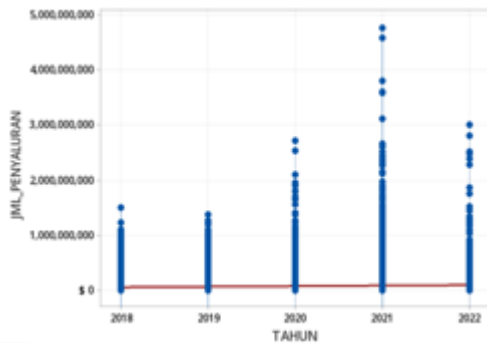
Oleh karena hipotesis penelitian ini bersifat ingin menguji untuk mengetahui korelasi sebagai berikut:

1. IPM Ekonomi (Pengeluaran) memiliki korelasi kuat dengan PDRB Per-Kapita wilayah Maluku;
2. Jumlah Penyaluran KUR dan UMi maupun jumlah debitur memiliki korelasi kuat dengan faktor-faktor permintaan dan

Disamping itu, penelitian ini juga dilakukan eksplorasi dengan melihat analisa *trend* dan *influence* KUR dan UMi di internet untuk melihat *awareness* masyarakat regional Maluku maupun nasional atas tersedianya pembiayaan KUR dan UMi sebagai bahan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

8



Gambar 4. Scatterplot jumlah penyaluran KUR dan UMI wilayah Maluku (2018 s.d Kuartal 1 2022)

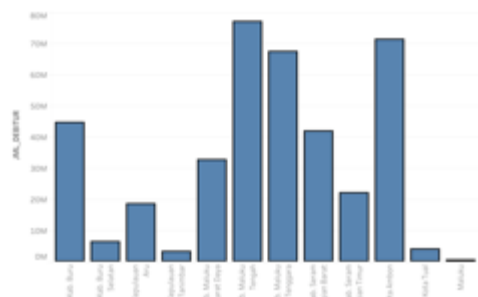
Penggunaan dana KUR dan UMI wilayah Maluku dibagi berdasarkan sektor usaha mayoritas adalah pada sektor perdagangan besar dan eceran (55%) disusul oleh sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (35%).



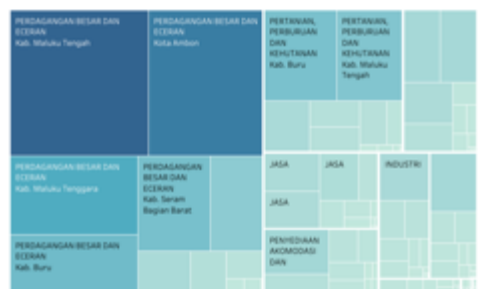
Gambar 5. Porsi Penggunaan Pembiayaan KUR dan UMI per-sektor usaha wilayah Maluku (2018 s.d Kuartal 1 2022)

Sebagai informasi, potensi usaha Maluku sampai dengan Tahun 2022

masih belum berada pada kategori wilayah dengan pengembangan sektor industri besar (*enterprise corporation/high production scale*) namun masih berada pada pola pengembangan usaha bahan mentah dan bahan olahan (perkebunan, kehutanan, perikanan).

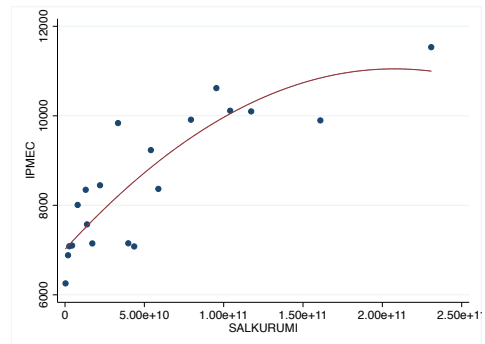


Gambar 6. Perbandingan Jumlah Debitur Berdasarkan Kabupaten/Kota wilayah Maluku (2018 s.d Kuartal 1 2022)



Gambar 7. Komposisi sektor usaha per kabupaten/kota wilayah Maluku atas pembiayaan KUR UMI (2018 s.d Kuartal 1 2022)

Berdasarkan visualisasi data penyaluran KUR dan UMi 2018 s.d Kuartal 1 2022 terlihat bahwa kabupaten dan kota besar di wilayah Maluku dengan sektor usaha utama yakni wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, dan Kabupaten Maluku Tenggara dengan sektor mayoritas perdagangan besar dan eceran. Berdasarkan latar belakang, tujuan, penelitian dan literasi, pemelitian ini dilakukan untuk menguji apakah Pembiayaan UMi memiliki daya dorong terhadap Indeks Pengembangan Manusia (IPM) terutama pada sektor pengeluaran. Selain itu, perlu untuk melihat hubungan tidak langsung antara Pembiayaan KUR dan UMi dengan PDRB per-Kapita. Hal lainnya dalam penelitian adalah dilakukan pengujian (vektor) atas dampak pembiayaan dalam bentuk KUR milik perbankan, infrastruktur perbankan dan penyaluran, jumlah usaha dan wirausaha.



Gambar 8. *Two-way binscatter (Noise Reduced)* antara IPM Pengeluaran dengan Nilai Penyaluran KUR dan UMi wilayah Maluku (2018 s.d Kuartal 1 2022)

Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pengeluaran dan nilai penyaluran KUR dan UMi wilayah Maluku mayoritas berada di atas atau tepat pada garis threshold terutama untuk wilayah kabupaten atau kota besar di Maluku. Jika dilihat dalam metode statistik, hubungan tersebut perlu diperhitungkan tidak hanya dengan variabel penyaluran KUR dan UMi namun diasumsikan terdapat variabel bebas lainnya yang dapat membentuk dan memiliki korelasi (secara teoritis) yang cukup kuat.

Tabel 3. Hasil Regresi *Fixed Effect*

<i>Variabel</i>	<i>Coef.</i>	<i>t-Stats</i>	<i>Prob.</i>
<i>SALKURUMI</i>	2.43	3.47	0.001
<i>lnKURBANUM</i>	81.46	5.04	0.000
<i>JWIRAUsh</i>	0.23	2.57	0.013
<i>C</i>	7207.8	43.84	0.000

Dependent Var.= IPMEC

Overall  $R^2 = 0.5707$  Prob > F = 0.0001

Within  $R^2 = 0.6215$

Between  $R^2 = 0.6060$

Model persamaan regresi *Generalized Least Squares* (GLS) data panel *fixed effect* tersebut bebas dari *multicollinearity* *confident interval* 95% dengan nilai vif (uncentered) di bawah 10 (3,66) serta bebas dari heteroskedastik dengan nilai 0.0128 (< *confident interval* 90%).

Tabel 4. Hasil Regresi *Random Effect*

<i>Varabel</i>	<i>Coef.</i>	<i>t-Stats</i>	<i>Prob.</i>
<i>SALKURUMI</i>	2.43	3.36	0.001
<i>lnKURBANKUM</i>	79.23	4.86	0.000
<i>JWTRASih</i>	0.28	3.15	0.002
<i>C</i>	7150	13.63	0.000

Dependent Var.= IPMEC

Overall  $R^2 = 0.5807$  Prob > F = 0.0001

Within  $R^2 = 0.6202$

Between  $R^2 = 0.6084$

Model persamaan regresi *Generalized Least Squares* (GLS) data panel *random effect* tersebut bebas dari *multicollinearity* *confident interval* 95% dengan nilai vif (uncentered) di bawah 10 (3,66) serta bebas dari heteroskedastik.

Melalui uji hausman sigmamore yang menspesifikasikan pada matriks

kovarian berdasarkan estimasi gangguan varian (*disturbance*) dengan nilai Prob>Chi sebesar 0.1024 (probability F dan Chi-square >  $\alpha = 5\%$ ) sehingga dinyatakan pilihan model regresi menggunakan *random effect*.

Ketiga variable bebas yakni nilai penyaluran KUR dan UMi milik Pemerintah RI, nilai penyaluran KUR milik perbankan (Bank Umum) serta jumlah wirausaha memiliki korelasi positif dan signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia sektor ekonomi (Pengeluaran) khususnya wilayah Maluku. Hal tersebut dapat menjawab pertanyaan yakni pembiayaan KUR dan UMi yang secara spesifik dirancang untuk meningkatkan permodalan inklusi dalam rangka peningkatan taraf ekonomi masyarakat bawah agar berusaha mandiri memiliki dampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sektor Ekonomi (Pengeluaran).

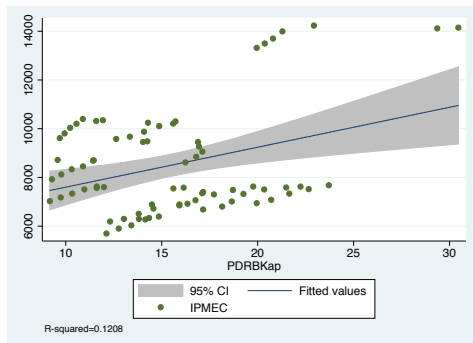
Tabel 5. Hasil Regresi (*Robust*) antara IPM Ekonomi dengan PDRB-Per Kapita

IPMEC	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t
PDRBKap	91.78886	28.64881	3.20	0.009
_cons	7082.599	445.6249	15.89	0.000

Model 1 Prob > F = 0.0094

IPMEC	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t
PDRBKap_lag1	16.3994	21.2074	0.77	0.457
_cons	8292.626	329.4277	25.17	0.000

Model 2 Prob > F = 0.4572



Gambar 9. Slope R-square antara IPM (Pengeluaran) dengan PDRB Per-Kapita wilayah Maluku.

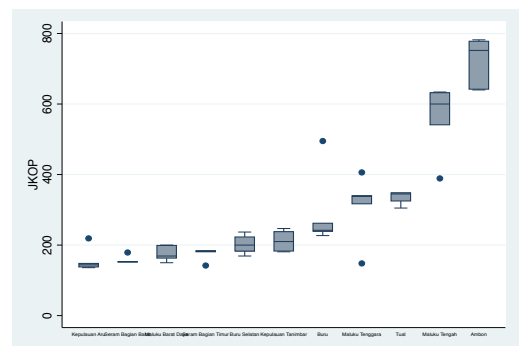
Korelasi positif serta signifikan terjadi antara IPM (Pengeluaran) terhadap PDRB per-Kapita wilayah Maluku namun tidak untuk PDRB tahun sebelumnya (Lag 1). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh PDRB per-Kapita terhadap IPM (pengeluaran) berjangka pendek begitupun jika diuji dengan *lag* lebih dari satu tahun (*lag*<sub>t-(1+n)</sub>).

Hasil uji asumsi (*robust*) terkait apakah jumlah debitur KUR dan UMi dipengaruhi oleh jumlah Bank Umum, BPR, lembaga pembiayaan serta koperasi yang tersedia di wilayah Maluku terjadi signifikansi (CI 95%) untuk variable jumlah Bank Umum (negatif), lembaga pembiayaan (positif), serta koperasi (positif). Namun, hasil ini

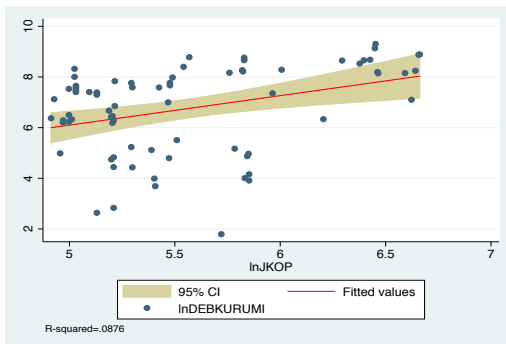
perlu dilakukan uji atas data primer dalam bentuk survey pada masyarakat (secara random) untuk merefleksikan kondisi riil atas potensi debitur KUR dan UMi melalui *channeling* dan perbankan.

Tabel 6. Hasil Regresi (*Robust*) antara Jumlah Debitur KUR & UMi (milik pemerintah) dengan Variabel Bebas

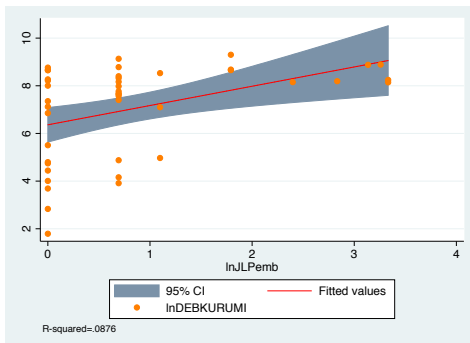
R-sq:		Obs per group:		
within = 0.6077		min =	1	
between = 0.0097		avg =	4.3	
overall = 0.0076		max =	7	
corr(u_i, X) = 0 (assumed)		Wald chi2(4) =	63.24	
		Prob > chi2 =	0.0000	
(Std. Err. adjusted for 30 clusters in KDWIL)				
IndikatorUMI	Coef.	Robust Std. Err.	z P> z  [95% Conf. Interval]	
lnJBANKUM	-1.121598	.5597751	-2.00 0.045	-2.218737 -.024459
lnJBPR	-.2142704	.3216814	-0.67 0.505	-.8447544 .4162136
lnJLPemb	.4268188	.2931983	2.21 0.027	.847357 .0046886
lnJKOP	3.955882	.8669771	3.52 0.000	1.355838 4.754325
_cons	-8.018556	4.899665	-1.64 0.102	-17.62172 1.584612
sigma_u	1.5179581			
sigma_e	.46529893			
rho	-.91418993			(fraction of variance due to u = 1)



Gambar 10. Box Plot Jumlah Koperasi di wilayah Maluku (2018 s.d 2021)



Gambar 11. Slope R-square antara Jumlah Debitur KUR dan UMi dengan Jumlah Koperasi di wilayah Maluku.

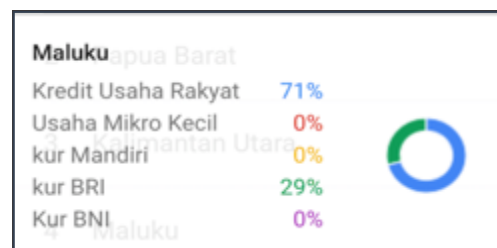
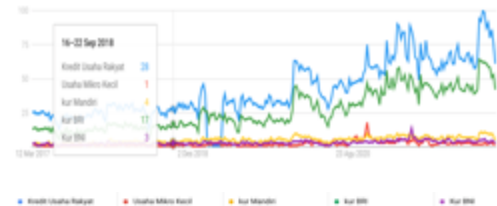


Gambar 12. Slope R-square antara Jumlah Debitur KUR dan UMi dengan Jumlah Lembaga Penyalur di wilayah Maluku.

Hubungan positif antara *dependen* variabel (jumlah debitur KUR dan UMi) dengan variable *independent* (jumlah lembaga penyalur dan jumlah koperasi). Hasil penelitian tidak menunjukkan variable endogen yang tidak memiliki korelasi sangat signifikan dalam

persamaan atau dilakukan *dropping* atas variabel.

### Trend Pencarian KUR dan UMi



Gambar 13. *Trend Search* atas pembiayaan KUR dan UMi wilayah Maluku (Google Data 2015 s.d 2022).



Gambar 14. *Sentiment Analysis* atas Pembiayaan KUR (Februari – Maret 2022).

Di sisi lainnya, penelitian ini melihat keinginan masyarakat (*people interest*) dalam mencari informasi terkini terkait pembiayaan KUR dan UMi khususnya masyarakat yang terhubung dengan jaringan internet selama kurun waktu

lima tahun terakhir secara nasional maupun di regional maluku cukup meningkat tajam. Terlihat dari trend pencarian (*search Hit*) pada google mulai dari bulan Januari 2020 kemudian menurun Kembali di bulan april 2020 selanjutnya terjadi *rebound* di akhir bulan Mei 2020 dengan titik puncak tertinggi terjadi di awal Januari 2022 serta nilai *sentiment* analisis terkait KUR yang cenderung positif dan selalu mendapat *mention* atau perhatian dari media di internet (twitter, berita, video, forum, dan podcast). Hal tersebut menandakan bahwa pembiayaan KUR masih menjadi perhatian di masyarakat di sisi penawaran kredit usaha. Hal tersebut menandakan bahwa pembiayaan KUR masih menjadi perhatian di masyarakat di sisi penawaran kredit usaha.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sesuai dengan penelitian yang disebutkan dalam literatur sebelumnya bahwa hasil penelitian ini membuktikan hal yang sama yakni tingkat Indeks Pembangunan Manusia (Pengeluaran) memiliki korelasi positif dengan Produk Domestik Regional Bruto per-Kapita khususnya dengan lingkup wilayah

Maluku. Namun, pengaruh tersebut tidak untuk bentuk *lag* beberapa tahun sebelumnya. Variabel lainnya seperti tingkat ketimpangan pendapatan (GINI Rasio), tingkat inflasi regional tidak memiliki korelasi dengan IPM (Pengeluaran). Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan hubungan positif dengan tingkat relasi tinggi antara IPM (Pengeluaran) dengan jumlah penyaluran KUR dan UMi milik pemerintah dan juga penyaluran KUR milik perbankan serta tingkat wirausaha di wiayah Maluku. Namun untuk penyaluran pembiayaan dari Bank bentuk mikro, kecil, dan menengah memiliki korelasi sangat lemah dengan tingkat IPM (Pengeluaran) wilayah Maluku. Adapun jika dilihat dari sisi jumlah debitur KUR dan UMi milik pemerintah memiliki korelasi tinggi dan positif dengan jumlah koperasi dimana peningkatan 1% jumlah koperasi akan meningkatkan 3% jumlah debitur KUR dan UMi di Maluku. Begitu juga terjadi korelasi atas peningkatan jumlah Lembaga pembiayaan akan berpengaruh 0,43% dari peningkatan jumlah debitur KUR dan UMI di Maluku. Namun hal tersebut berbanding



terbalik dengan jumlah Bank Umum dan BPR dimana akan berpengaruh negatif pada pertumbuhan debitur KUR dan UMi milik pemerintah. Hal ini diasumsikan persaingan penyaluran antara KUR dan UMi milik pemerintah dengan milik korporasi perbankan secara umum maupun milik Bank Perkreditan Rakyat dengan binaan atas KUR dari masing-masing pihak Bank. Dari sisi trend atas pencarian dan informasi terkait KUR, terjadi kenaikan yang cukup tinggi mulai dari pertengahan Tahun 2020 sampai dengan saat ini (awal Tahun 2022). Adapun untuk nilai permintaan UMi masih sangat kecil dan tidak ada permintaan informasi terkait UMi di wilayah Maluku. Dari hasil-hasil penelitian ini dapat mengindikasikan bahwa pembiayaan KUR khususnya wilayah Maluku masih sangat potensial untuk dikembangkan khususnya melalui koperasi dikarenakan persaingan dengan perbankan cukup tinggi. Selain itu, juga peran pembiayaan KUR milik pemerintah untuk regional Maluku (secara khusus) sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan ekonomi serta tingkat

kewirausahaan masyarakat. Tingkat *Awareness* masyarakat akan kebutuhan pembiayaan terjangkau melalui KUR masih sangat diminati khususnya pada periode ekonomi yang sedang buruk (dampak pandemi COVID-19). Walaupun bentuk KUR didesain mirip dengan produk perbankan yang terikat aturan-aturan *mikroprudentials*, peningkatan peran koperasi sebagai bagian dari mekanisme peningkatan penyaluran KUR milik pemerintah perlu dipertimbangkan karena selain dengan adanya alasan atas margin biaya atas biaya penyaluran melalui koperasi dapat jauh lebih rendah dari perbankan juga dapat menyentuh hampir seluruh wilayah penduduk sampai level terbawah dikarenakan jumlah koperasi yang lebih banyak dibanding jumlah perbankan. Namun, perlu diperhatikan juga tingkat keamanan jaminan pembiayaan melalui koperasi jika terjadi kenaikan *Non-Performing Loan* (NPL) dikarenakan sistem koperasi tidak memberikan pola pemberian jaminan keamanan atas dana tak tertagih sehingga perlu dikembangkan mekanisme tingkat jaminan atas NPL terhadap koperasi dalam rangka

penyaluran KUR. Selain itu, program pemerintah khususnya KUR dan UMi dapat dikaji ulang agar sasaran untuk menanggulangi kemiskinan bisa tercapai, karena penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan program KUR dan UMi saja, tetapi secara tidak langsung program KUR dan UMi dapat memberikan kesempatan kerja bagi penduduk miskin dengan UMKM.

Literasi kepada masyarakat mengenai penyaluran program KUR dan UMi kiranya bisa dilakukan lebih masif. Sehingga mempermudah masyarakat bisa mengakses program KUR dan UMi.

## **IMPLIKASI DAN KETERBATASAN**

Penelitian ini masih jauh dari kata cukup atau sempurna dikarenakan oleh keterbatasan penggunaan sampling dari data sekunder yang tersedia untuk masing-masing variable yakni sekitar 70 data per-variabel dengan rentang waktu mulai tahun 2015 sampai dengan 2021. Namun, jumlah tersebut masih memenuhi standard teorema limit pusat (*Central Limit Theorem*). Dengan terbatasnya jumlah sampel tersebut maka semakin minimal penggunaan metode analisis statistik serta sulit dalam pembentukan model yang mendekati populasi sehingga mayoritas

mekanisme permodelan level lanjut (clustering, *countouring*, Bayessian *Modeling*, dan *VAR Modeling*) tidak dimungkinkan untuk dilakukan. Selain itu, jumlah sampel semakin berkurang Ketika dilakukan transformasi data untuk memperkecil nilai varians sampai titik minimum. Hal lain terkait penelitian yakni diperlukan penelitian riil dengan sumber data dari data primer untuk membuktikan maupun membandingkan hasil antara kondisi riil (sesuai dengan pengamatan responden) dengan data uji sekunder. Hal ini dapat menjadi komplemen di dalam mendapatkan hasil level pengetahuan yang lebih dalam (*deepened insight*) terkait kondisi penyaluran KUR dan UMi serta kaitannya dengan fakta kondisi masyarakat.

## **REFERENSI**

- Adam, L, *Pelibatan Koperasi Dalam Program Kur: Sebuah Inovasi Kebijakan Ekonomi Dengan Peluang Dan Tantangannya*. Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi, LIPI,
- BPS. (2015-2021), *Maluku Statistika Dalam Angka*. Retrieved from: [BPS.go.id](https://bps.go.id)

- Fouejieu, A., Sahay, R., Cihak, M., & Chen, S. (2020). Financial Inclusion and inequality: A cross country analysis. *The Journal of International Trade & Economic Development*.
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 1-28.
- Raji, R. O. (2021). Testing the Relationship between Financial Inclusion, Institutional Quality and Inclusive Growth for Nigeria. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 1(1), 18-28.  
<https://doi.org/10.35877/454R1.daengku393>
- Sari, I.Z, Falianty, T.A 2021. Inklusi Keuangan dan Ketimpangan Pendapatan: Apakah Struktur Keuangan Berpengaruh? <https://doi.org/10.29244/jekp.10.1.2021.72-100>
- Sarma, M 2008. Index of Financial Inclusion. ICRIER Working Papers No. 215. Indian Council for Research on International Economic Relations.  
[http://www.icrier.org/pdf/Working\\_Paper\\_215.pdf](http://www.icrier.org/pdf/Working_Paper_215.pdf).
- Sarma, M., & Pais, J. (2011). Financial Inclusion and Development. *Journal of International Development*, 23(5).
- Todaro, M.P. Smith, S.C. (2012). *Economic Development* (11th ed). New York: Pearson.
- Ummah, B. B., Nuryartono, N., & Anggraeni, L. (2015). Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 4(1), 1-27.